DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

Gema Publica
Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik

e-ISSN: 2548-1363

Received: 22, October 2025;
Revised: 14, April 2026;
Accepted: 17, September 2026;
Published: 31, October 2026.

Revitalisasi Pengelolaan Pariwisata Daerah melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis Komunitas di Pentadio Resort

*Corresponding author(s)
email: srisunarti@umgo.ac.id

*Sri Sunarti[1], Yanti Aneta[2]

[1] Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

[2] Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstract

This study examines the implementation of tourism management policy at Pentadio Resort, Gorontalo Regency, in the context of post-pandemic recovery. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through public policy implementation perspectives as well as the Collaborative Governance (CG) and Multi-Helix Collaboration Model (MHCM) frameworks. The findings show that tourism infrastructure has deteriorated after the pandemic, while coordination among policy actors remains weak. The third-party management system has improved operational efficiency, but it has also reduced meaningful local community participation. Major challenges include limited resources, weak regulatory synchronization, and ineffective policy communication. This study contributes to the literature by proposing an integrated Collaborative Governance–Multi-Helix implementation model for post-pandemic regional tourism management in a non-priority destination context. The findings also highlight the practical importance of strengthening Destination Management Organizations (DMO), developing local tourism observatories, and integrating Sustainable Development Goals (SDGs) into regional tourism policy evaluation.

Kata kunci: *policy implementation; Collaborative Governance; Multi-Helix Collaboration; tourism destination management; community empowerment; sustainable tourism*

Copyright © 2026 by Authors,
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Meskipun konsep *community-based tourism* menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Giampiccoli & Mtapuri, 2020), pengelolaan pariwisata daerah masih sering didominasi oleh pendekatan *top-down* yang membatasi partisipasi warga dan memicu stagnasi destinasi (Tosun, 2000). Kesenjangan penelitian mendasar terletak pada belum tersedianya model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang mampu merestrukturisasi objek wisata seperti Pentadio Resort yang membutuhkan revitalisasi (*rejuvenation*) guna mencegah penurunan daya saing (Butler, 2006). Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris mengenai integrasi peran antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal agar proses revitalisasi tersebut mampu memberikan kesetaraan daya tawar, transparansi pembagian manfaat, serta jaminan keberlanjutan ekonomi daerah (Ansell & Gash, 2007).

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

Pariwisata daerah merupakan sektor strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai sektor multisektoral, pariwisata menghasilkan efek pengganda pada transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan (Izziyana et al., 2022; Suryade et al., 2022; Gartiwi et al., 2022). Di tingkat daerah, tantangan pengelolaan destinasi menjadi semakin kompleks pada masa pascapandemi karena menuntut sinergi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan (Ariantika et al., 2022; Hadisun et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata berkaitan positif dengan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis komunitas (Mahyudin, 2019; Mubaroq et al., 2023; Haris et al., 2024; Ariantika et al., 2022). Pada saat yang sama, implementasi kebijakan pariwisata masih menghadapi hambatan berupa lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan promosi yang belum optimal (Lolkary & Laurens, 2024; Setiawan, 2021).

Secara konseptual, Collaborative Governance (CG) banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pariwisata melalui penyelarasan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan (Lolkary & Laurens, 2024). Studi Din et al. (2025) di Wakatobi dan Luntungan (2024) di Likupang menunjukkan bahwa integrasi CG dengan nilai budaya lokal dapat memperkuat pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Namun, penerapan CG tetap menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya komunikasi antaraktor (Idrus et al., 2024; Din et al., 2025).

Kajian pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penurunan kunjungan dan pendapatan wisata menekan infrastruktur destinasi serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus menuntut inovasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi lokal (Rifka, 2025; Ramadhan et al., 2022; Andriani et al., 2021). Di sisi lain, muncul berbagai bentuk adaptasi seperti promosi digital, tur virtual, dan diversifikasi produk berbasis alam dan budaya (Pradana et al., 2024; Safitri et al., 2023).

Meskipun banyak penelitian membahas implementasi kebijakan pariwisata, kajian empiris yang mengintegrasikan Collaborative Governance dan Multi-Helix Collaboration dalam konteks destinasi wisata daerah non-prioritas masih terbatas. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada evaluasi kinerja kebijakan atau dampak ekonomi, sementara pembahasan mengenai model implementasi yang berbasis kolaborasi lokal dan kearifan masyarakat belum banyak dikembangkan. Kesenjangan ini menjadi penting dalam konteks Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo, yang menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan pascapandemi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan daya tarik wisata di Pentadio Resort serta merumuskan model implementasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat yang mengintegrasikan prinsip Collaborative Governance dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata daerah.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengombinasikan studi pustaka dan temuan empiris lapangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk merumuskan model kebijakan yang menekankan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperluas literatur implementasi kebijakan pariwisata melalui integrasi Collaborative Governance dan perspektif Multi-Helix dalam konteks destinasi non-prioritas. Secara praktis, penelitian ini menawarkan arahan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan pariwisata yang lebih adaptif, partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses implementasi kebijakan pengelolaan daya tarik wisata Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguraikan fenomena kebijakan secara kontekstual, menggambarkan hubungan antaraktor, serta menjelaskan dinamika kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (Andriyansyah, 2019; Silomba et al., 2021). Desain penelitian disusun secara sistematis melalui penetapan sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis yang jelas agar proses penelitian dapat ditelusuri secara transparan.

Rancangan penelitian diawali dengan penentuan lokasi dan unit analisis, yaitu Pentadio Resort, yang dipilih karena mewakili kompleksitas pengelolaan kebijakan pariwisata di tingkat daerah. Penelitian berfokus pada proses implementasi kebijakan, peran lembaga pemerintah, pengelola wisata, serta partisipasi masyarakat sekitar. Sampel ditentukan secara purposif berdasarkan relevansi dan keterlibatan informan terhadap kebijakan yang dikaji. Penelitian ini melibatkan Enam informan yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah di bidang pariwisata, pengelola Pentadio Resort, anggota Pokdarwis, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data dilakukan pada periode September–Desember, 2025], sedangkan wawancara berlangsung selama sekitar 20 menit untuk setiap informan guna menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para aktor kebijakan. Observasi digunakan untuk memahami kondisi aktual pengelolaan dan interaksi di antara pelaksana kebijakan. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen, laporan kebijakan, publikasi ilmiah, serta data statistik yang relevan dengan konteks penelitian (Silomba et al., 2021; Riadi et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

dengan mengikuti protokol etika penelitian, dan seluruh informasi dicatat secara sistematis untuk menjamin keterlacakan hasil.

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan panduan wawancara yang disusun sesuai dengan fokus kajian, yakni dimensi komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III dalam Andriyansyah, 2019), serta dimensi kolaborasi antaraktor dalam kerangka Collaborative Governance dan Multi-Helix Collaboration Model. Panduan ini memuat pertanyaan terbuka yang mendorong informan untuk menjelaskan pengalaman serta pandangan mereka terhadap implementasi kebijakan. Observasi lapangan dilengkapi dengan lembar pengamatan untuk mencatat kondisi fisik, kegiatan wisata, serta pola interaksi antaraktor. Semua instrumen tersebut diujicobakan secara terbatas untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian dengan konteks penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Andriyansyah, 2019). Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik melalui proses pengodean data wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema-tema utama yang diturunkan dari dimensi Collaborative Governance dan Multi-Helix Collaboration Model. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis yang menampilkan hubungan antaraktor, pola kolaborasi, dan konteks implementasi kebijakan. Tahap akhir dilakukan melalui verifikasi berulang terhadap hasil interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang valid dan mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan.

Validitas hasil penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode (Silomba et al., 2021; Riadi et al., 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi resmi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk meminimalkan bias. Kredibilitas penelitian diperkuat melalui konfirmasi hasil kepada informan (member checking) dan audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian. Dependabilitas diperkuat melalui pencatatan prosedur secara rinci dan deskripsi langkah analisis yang transparan (Deru et al., 2023).

Dengan rancangan metodologis yang sistematis ini, penelitian memberikan dasar yang transparan untuk menelusuri proses pengumpulan dan analisis data dalam konteks yang sama. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisata di Pentadio Resort, serta mengembangkan model implementasi kebijakan berbasis kolaboratif yang dapat diterapkan pada destinasi wisata daerah lainnya.

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Kondisi Pengelolaan dan Infrastruktur Wisata Pentadio Resort Pascapandemi

Hasil penelitian yang telah diolah disajikan pada Tabel 1, yang memperlihatkan kondisi infrastruktur dan fasilitas utama di Pentadio Resort pascapandemi. Data dalam tabel diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal.

Keterangan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penurunan kondisi fisik fasilitas wisata berkaitan dengan keterbatasan anggaran perawatan dan rendahnya investasi pascapandemi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kerusakan fasilitas, minimnya perawatan, dan belum terintegrasinya promosi digital menjadi kondisi utama yang memengaruhi pengelolaan destinasi.

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Pentadio Resort Pascapandemi

Aspek Infrastruktur	Kondisi Sebelum Pandemi	Kondisi Pascapandemi	Keterangan
Area pemandian air panas	Baik dan berfungsi optimal	Terjadi kerusakan pada beberapa kolam	Butuh perawatan dan perbaikan struktural
Taman rekreasi dan area hijau	Terawat dan bersih	Rumput dan taman kurang terpelihara	Perlu revitalisasi dan tenaga kebersihan tambahan
Fasilitas penginapan	Digunakan secara aktif	Sebagian tidak beroperasi	Rendahnya okupansi dan perawatan minim
Aksesibilitas jalan	Lancar	Beberapa bagian rusak	Diperlukan peningkatan infrastruktur jalan menuju lokasi
Promosi digital	Terbatas	Tidak terintegrasi	Perlu penguatan promosi digital multi-platform

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa revitalisasi infrastruktur di Pentadio Resort belum didukung oleh koordinasi lintas level yang kuat maupun pembiayaan yang memadai. Kondisi ini terlihat dari lambatnya perbaikan fasilitas utama dan belum optimalnya dukungan promosi destinasi.

Kondisi Pentadio Resort menunjukkan bahwa pengelolaan masih didominasi oleh mekanisme birokratis, sementara koordinasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat belum berjalan optimal. Pemulihan infrastruktur di Pentadio Resort juga dipengaruhi oleh keterhubungan antaraktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wisata.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perubahan sistem pengelolaan Pentadio Resort yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah menjadi dikelola oleh pihak ketiga. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalitas pengelolaan, namun hasilnya menunjukkan dampak yang beragam. Berdasarkan wawancara dengan pengelola dan masyarakat, sistem pengelolaan oleh pihak ketiga menimbulkan dualisme tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola,

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan koordinasi dalam pengelolaan destinasi.

Dari sisi efisiensi operasional, pihak ketiga mampu melakukan inovasi dalam hal tiket elektronik, promosi terbatas melalui media sosial, dan penyediaan layanan berbasis teknologi. Namun, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan menjadi menurun, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi belum diikuti oleh perluasan peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi.

Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan mereka dalam pengelolaan juga menunjukkan variasi. Sebagian warga menilai sistem baru kurang inklusif, karena peran masyarakat lokal lebih banyak terbatas sebagai tenaga kerja informal tanpa ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Pentadio Resort, partisipasi masyarakat masih dominan pada kegiatan operasional dan belum mencakup keterlibatan strategis.

Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wisata

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pentadio Resort dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Di Pentadio Resort, koordinasi antara Dinas Pariwisata, pengelola pihak ketiga, dan kelompok masyarakat belum berjalan efektif, sehingga memunculkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat pengambilan keputusan.

Hambatan eksternal meliputi ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya komitmen politik dalam mendukung sektor pariwisata. Di tingkat nasional, kebijakan pengelolaan pariwisata lebih banyak berorientasi pada destinasi unggulan, sementara destinasi lokal seperti Pentadio Resort memperoleh dukungan yang terbatas. Kondisi pascapandemi juga memperlambat pemulihan melalui berkurangnya alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi lintas level.

Selain hambatan struktural, faktor nonstruktural seperti resistensi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat, dan miskomunikasi antaraktor turut memperlemah efektivitas kebijakan. Di Pentadio Resort, miskomunikasi antara pengelola dan masyarakat memunculkan persepsi negatif terhadap sistem pengelolaan baru dan memperlebar jarak sosial antara pengelola dan komunitas lokal.

Strategi Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Antaraktor

Dalam menghadapi berbagai hambatan, pemerintah daerah menerapkan sejumlah strategi adaptif yang berorientasi pada kolaborasi dan optimalisasi sumber daya lokal. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan Dana Desa dan kemitraan publik–swasta untuk pembiayaan infrastruktur dan promosi wisata, digitalisasi promosi destinasi melalui media sosial dan platform daring, serta pemberdayaan Pokdarwis dan komunitas lokal dalam pengembangan produk wisata dan pelestarian budaya.

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

Implementasi strategi-strategi ini menunjukkan hasil positif awal, meskipun masih memerlukan perbaikan. Digitalisasi promosi telah meningkatkan keterjangkauan informasi tentang Pentadio Resort, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemasaran nasional. Program pemberdayaan Pokdarwis berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan dan pelayanan wisata, namun belum mencapai keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat koordinasi lintas level dengan menginisiasi forum komunikasi rutin antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Forum ini membantu menurunkan konflik kepentingan dan memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi.

Model Implementasi Kebijakan yang Relevan untuk Pengelolaan Pentadio Resort

Berdasarkan hasil analisis, pola hubungan antaraktor di Pentadio Resort menunjukkan kebutuhan akan model implementasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media secara lebih terintegrasi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan destinasi memerlukan penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas.

Dalam konteks Pentadio Resort, pola kebutuhan tersebut tampak pada tiga dimensi utama, yaitu koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi horizontal antaraktor lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi destinasi wisata.

Berdasarkan temuan lapangan, keberhasilan pengelolaan destinasi dapat diamati melalui indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Indikator tersebut mencakup kontribusi terhadap PAD, keterlibatan masyarakat, pelestarian budaya dan sumber daya alam, serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai pengelolaan Pentadio Resort pascapandemi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antaraktor—pemerintah, swasta, dan masyarakat—dalam proses implementasi (Din et al., 2025; Farizky et al., 2022). Dalam konteks Pentadio Resort, penerapan kebijakan pariwisata belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolaboratif tersebut karena masih didominasi oleh pendekatan top-down. Dominasi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis membatasi peran masyarakat dan pelaku swasta, sehingga kolaborasi belum berkembang sebagai mekanisme yang setara dan partisipatif.

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil studi sebelumnya yang menyoroti efektivitas Collaborative Governance (CG) dalam tata kelola destinasi wisata. Studi Wakatobi yang dilakukan oleh Din et al. (2025) menunjukkan bahwa sinergi multi-pemangku kepentingan dalam kerangka CG dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

dan ketahanan destinasi terhadap krisis. Dalam kasus Pentadio Resort, konsep CG belum diimplementasikan secara menyeluruh karena mekanisme formal koordinasi antaraktor masih terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada lambatnya pengambilan keputusan dan rendahnya kemampuan adaptasi kebijakan terhadap perubahan ekonomi dan sosial pascapandemi (Farizky et al., 2022).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian lain seperti Sandy (2025) tentang kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) di Makassar, Pentadio Resort menunjukkan tingkat integrasi kebijakan yang lebih rendah. Pada kasus Makassar, pembagian peran antarpemangku kepentingan lebih jelas dalam aspek pembiayaan, promosi, dan pengelolaan infrastruktur, sedangkan di Pentadio Resort keterlibatan swasta masih terbatas pada fungsi operasional. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya akuntabilitas lintas sektor serta minimnya inovasi dari aktor nonpemerintah. Dengan demikian, konteks Pentadio Resort menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan tata kelola digital belum cukup berkembang tanpa dukungan pemberdayaan komunitas yang memadai (Hidayah et al., 2022).

Analisis terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa penurunan kualitas fasilitas pascapandemi berhubungan langsung dengan lemahnya perencanaan dan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan model implementasi Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Andriyansyah, 2019). Dalam konteks Pentadio Resort, lemahnya komunikasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya menjelaskan mengapa perawatan fasilitas dan pembangunan infrastruktur berjalan tidak optimal (Lolkary & Laurens, 2024; Luntungan, 2024).

Dari perspektif implementasi kebijakan lintas level, penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal. Ketidaksinkronan kebijakan menghambat transfer anggaran dan mengurangi efektivitas koordinasi program pembangunan destinasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Eikman et al. (2021) dan Kanaha (2024), yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan destinasi. Sebagai destinasi non-prioritas, Pentadio Resort belum memperoleh dukungan finansial dan kebijakan yang proporsional, sehingga pemulihan pascapandemi berlangsung lebih lambat dibandingkan daerah yang memperoleh dukungan lintas level yang kuat (Bahar dan Romadloni, 2025).

Hasil wawancara dan observasi juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam partisipasi masyarakat lokal, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis. Berbeda dengan beberapa desa wisata berbasis komunitas, keterlibatan masyarakat di Pentadio Resort masih bersifat simbolik dan operasional, tanpa akses yang memadai pada ruang kebijakan dan perencanaan (Ariantika et al., 2022; Setiawan, 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi CG memerlukan kejelasan peran serta mekanisme partisipatif yang sistematis (Muallim et al., 2024; Haris et al., 2025). Tanpa pemberdayaan masyarakat, kebijakan pariwisata cenderung kehilangan legitimasi sosial dan berisiko melemahkan keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang.

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

Dari sisi strategi pemerintah daerah, upaya untuk menerapkan kolaborasi melalui forum komunikasi rutin antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat telah memberikan hasil positif dalam mengurangi konflik kepentingan. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada aspek koordinasi horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa pola kolaborasi yang berkembang baru mencerminkan tahap awal Collaborative Governance dan belum mencapai integrasi yang lebih luas sebagaimana diandaikan dalam Multi-Helix Collaboration Model (Fitriana et al., 2025). Belum signifikannya peran akademisi dan media menunjukkan adanya ruang penguatan pada aspek kapasitas analitik, produksi pengetahuan, dan transparansi kebijakan.

Kontribusi Teoritis dan Kebijakan

Dari aspek konseptual, integrasi CG dan MHCM dalam pengelolaan Pentadio Resort memiliki implikasi teoritis penting. Pertama, penelitian ini memperluas literatur implementasi kebijakan pariwisata dengan menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya berkaitan dengan sumber daya dan birokrasi, tetapi juga dengan desain kolaborasi antaraktor di tingkat lokal (Kirana & Artisa, 2020; Bitsura-Meszaros et al., 2019). Kedua, konteks lokal Gorontalo memperkaya konsep Collaborative Governance dengan menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran, inklusivitas masyarakat, dan kapasitas kelembagaan daerah. Ketiga, penelitian ini menunjukkan relevansi MHCM pada destinasi non-prioritas, di mana keterlibatan akademisi dan media dapat menjadi penguat koordinasi, pembelajaran kebijakan, dan transparansi tata kelola. Budiani et al. (2018) dan Khalid et al. (2019) juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata sangat ditentukan oleh peran Destination Management Organization (DMO) yang berfungsi sebagai penghubung antaraktor. Dalam konteks Pentadio Resort, ketiadaan DMO formal memperlihatkan kesenjangan kelembagaan yang melemahkan akuntabilitas dan koordinasi lintas instansi.

Dalam konteks pascapandemi, adaptasi kebijakan berbasis CG dan MHCM menjadi urgensi yang tidak terhindarkan. Secara kebijakan, temuan ini menegaskan perlunya model tata kelola yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk memperkuat pengelolaan destinasi daerah. Hasil ini sejalan dengan rekomendasi Putra (2024) dan Berliandaldo et al. (2022), yang menyarankan penguatan DMO di tingkat daerah untuk mempercepat koordinasi lintas sektor dan mendukung pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Muhamad et al. (2024) menambahkan bahwa pembentukan observatorium pariwisata nasional dapat berfungsi sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kebijakan berbasis data yang terintegrasi. Apabila diadaptasi pada tingkat lokal, mekanisme ini dapat mendukung evaluasi kebijakan yang lebih sistematis dan memperkuat evidence-based policy di sektor pariwisata daerah.

Selain memperkuat teori implementasi kebijakan kolaboratif, hasil penelitian ini juga berimplikasi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata di tingkat provinsi dan nasional. Integrasi CG dan MHCM dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan destinasi yang lebih inklusif, adaptif, dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Nugroho et al., 2024). Dalam konteks

DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.142-156

Pentadio Resort, penerapan prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari sisi praktis, penerapan model kolaboratif ini dapat menjadi contoh replikasi bagi destinasi lain yang memiliki karakteristik sosial-budaya serupa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang implementasi kebijakan publik di sektor pariwisata dengan menegaskan peran kolaborasi lintas aktor, integrasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas lokal. Temuan empiris di Pentadio Resort menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi antaraktor dan konteks sosial tempat kebijakan dijalankan. Dengan demikian, model CG dan MHCM yang adaptif dan berbasis komunitas dapat diposisikan sebagai alternatif strategis untuk memperkuat tata kelola pariwisata daerah dan meningkatkan ketahanan destinasi pada era pascapandemi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan daya tarik wisata Pentadio Resort sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendekatan kolaboratif antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa kelemahan infrastruktur, koordinasi antarlembaga yang tidak sinkron, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Penerapan sistem pengelolaan oleh pihak ketiga meningkatkan efisiensi operasional, namun mengurangi partisipasi komunitas lokal. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi Collaborative Governance (CG) dan Multi-Helix Collaboration Model (MHCM) relevan untuk memperkuat tata kelola pariwisata daerah yang lebih adaptif dan partisipatif.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa model integratif CG–MHCM dapat memperkuat tata kelola destinasi wisata melalui koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi horizontal antaraktor lokal. Implikasi teoretis penelitian ini memperluas wacana implementasi kebijakan publik dengan menambahkan dimensi kearifan lokal dan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci keberlanjutan destinasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran Destination Management Organization (DMO), mengembangkan observatorium pariwisata lokal, dan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam evaluasi kebijakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan hanya pada satu lokasi dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga temuan tidak ditujukan untuk generalisasi statistik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif pada destinasi lain di Indonesia untuk menguji efektivitas model kolaboratif ini secara lebih luas.

Acknowledgments
The authors would like to thank all parties who provided administrative and technical support for this research.

Funding
This research received no external funding.

Conflict of Interests
The authors declare no conflict of interest.

Data Availability Statement
The data is available by request to the author to ensure participant privacy protection. Due to technical issues regarding account access and the presence of sensitive, non-anonymized personal information in the initial dataset, the materials are not hosted on a public repository. Complete analysis code, preprocessing scripts, and trained model weights will be securely provided directly by the corresponding author upon reasonable request.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad, Amil Amil, and Zulhadi Zulhadi. 2018. "Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Ulul Albab* 22(2). doi:10.31764/jua.v22i1.579.

Andriani, Lis, Muji R. Ramelan, and Yuniarti Fihartini. 2021. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumsi Pariwisata: Studi Empiris Pada Wisatawan Domestik Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 116–34. doi:10.23960/jbm.v17i3.245.

Andriyansyah, Amir C. 2019. "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)." *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 2(2):103. doi:10.26740/jdmp.v2n2.p103-115.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mul018

Atmojo, Muhammad E., and Helen D. Fridayani. 2021. "An Assessment of Covid-19 Pandemic Impact on Indonesian Tourism Sector." *Journal of Governance and Public Policy* 8(1):1–9. doi:10.18196/jgpp.811338.

Bahar, Madjid F., and Sahru Romadloni. 2025. "Proses Transisi Kabupaten Banyuwangi Dari Ikon Kota Santet Menjadi Kota Pariwisata." *Js* 4(2):51–60. doi:10.62734/js.v4i1.544.

Berliandaldo, Mahardhika, Angga W. H. Fasa, and Dini Andriani. 2022. "Implikasi Peran Destination Management Organization (Dmo) – Destination Governance (Dg) Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Kepariwisataan* 21(2):113–29. doi:10.52352/jpar.v21i2.845.

Betty Silfia Ayu Utami jdep, and Abdullah K. jdep. 2021. "Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 4(1):383–89. doi:10.33005/jdep.v4i1.198.

Bitsura-Meszaros, Karly, Erin Seekamp, Mae A. Davenport, and Jordan W. Smith. 2019. "A PGIS-Based Climate Change Risk Assessment Process for Outdoor Recreation and Tourism Dependent Communities." *Sustainability* 11(12):3300. doi:10.3390/su11123300.

Budiani, Sri R., Windarti Wahdaningrum, Dellamanda Yosky, Eline Kensari, Hendra S. Pratama, Henny Mulandari, Heru T. N. Iskandar, Mica Alphabettika, Novela Maharani, Rizka F. Febriani, and Yanti Kusmiati. 2018. "Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah." *Majalah Geografi Indonesia* 32(2):170. doi:10.22146/mgi.32330.

Butler, R. W. (Ed.). (2006). *The tourism area life cycle: Applications and modifications* (Vol. 1). Channel View Publications.

Deru, H. H., Kiagus M. Sobri, Alfitri Alfitri, Andreas Leonardo, and Eko Prasetyo. 2023. "Pentingnya Perilaku Pelaksana Regulasi Untuk Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Yang Tinggi." *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 6(1):01–15. doi:10.46774/pptk.v6i1.533.

Dewa Putu Bagus Pujawan Putra. 2024. "Destination Management Organization (DMO) in Indonesia, an Overview and Should Be Continue?" *Jastd* 2(1):71–75. doi:10.52352/jastd.v2i1.1554.

Din, M. A. u., Purwa nto, Retno S. Astuti, and Ida H. Dwimawanti. 2025. "Stakeholder Collaboration in the

Development of Sustainable Marine Tourism in Wakatobi Regency, Indonesia." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IX(XIV):638–51. doi:10.47772/ijriss.2025.914mg0050.

Eikman, Alfian, Muhammad M. Lubis, and Baiq R. T. Yunarni. 2021. "Pengaruh Regulasi Perhotelan Terhadap Pelaku Bisnis Lokal Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Yogyakarta Studi Kasus: Grup Aston Internasional." *Journal of Applied Business and Banking (Jabb)* 2(2). doi:10.31764/jabb.v2i2.5539.

Fadli, Moh., Edi Susilo, Dhiana Puspitawati, Abraham M. Ridjal, Diah P. Maharani, and Airin Liemanto. 2022. "Sustainable Tourism as a Development Strategy in Indonesia." *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* 10(1):23–33. doi:10.21776/ub.jitode.2022.010.01.04.

Farizky, Vonny, Hardi Warsono, and Augustin R. Herwati. 2022. "A Study of Collaborative Governance and Its Effect on Tourism Sector During the COVID-19 Pandemic in Indonesia." *Journal of Madani Society* 1(3):158–66. doi:10.56225/jmsc.v1i3.139.

Fitriana, Annisa, Andy F. Wijaya, Alfi H. Wanto, and Anurat Anantanatorn. 2025. "Multi Helix Collaboration Model as a Policy Instrument of Tourism Village Policy in Pujon Kidul Tourism Village." *Journal of Local Government Issues* 8(2):196–214. doi:10.22219/logos.v8i2.38605.

Gartiwi, Merdiana M., R. I. Irawati, and Nina Karlina. 2022. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran." *Responsive* 5(2):69. doi:10.24198/responsive.v5i2.41126.

Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2020). Community-based tourism: A question of power, participation, and sustainability. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1–16.

Hadisun, Hadisun, Maulana Mukhlis, and Joko R. Widokarti. 2024. "Formulasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Natuna." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 9(6):3350–66. doi:10.36418/syntax-literate.v9i6.15454.

Haris, Muhammad N., Murianto Murianto, and Sri Wahyuningsih. 2024. "Bentuk-Bentuk Partisipasi Kelompok Sadar Wisata Tereng Wilis Dalam Pengelolaan Desa Wisata Perian Kecamatan Montong Gading." *JRTour* 4(2):507–18. doi:10.47492/jrt.v4i2.3669.

Haris, Subhan, Achmad Sahid, Muh Z. Badollahi, and Muhammad A. Samad. 2025. "Integrasi Kebijakan Pariwisata Dengan Pembangunan Sosial Ekonomi Di Morowali." *Pusaka Journal of Tourism Hospitality Travel and Business Event* 7(1):295–305. doi:10.33649/pusaka.v6i2.473.

Hengky, S. H. 2023. "Challenges of Sawarna Coastal Sustainable Tourism in Banten, Indonesia." *Journal of Aquaculture & Marine Biology* 12(2):138–40. doi:10.15406/jamb.2023.12.00366.

Hidayah, Nurdin, Herlan Suherlan, and Fajar K. K. Putra. 2022. "Stakeholders' Synergies in Developing Smart Tourism Destination. A Phenomenographic Study." *Journal of Environmental Management and Tourism* 13(2):313. doi:10.14505/jemt.v13.2(58).02.

Husen, Irfan A. 2025. "Manajemen Pemasaran Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Kepulauan Seribu: Sebuah Literatur Review." *Jemba* 4(4):685–98. doi:10.53625/jemba.v4i4.11276.

Hutagalung, Simon S., and Dedy Hermawan. 2021. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Lampung Selatan." *Sosiohumaniora* 23(1):124. doi:10.24198/sosiohumaniora.v23i1.24698.

I Gusti Ngurah Saka Ariantika, M. Jumail, and Murianto Murianto. 2022. "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat." *JRTour* 2(1):01–10. doi:10.47492/jrt.v2i1.1892.

Idrus, Sitti H., Laode M. G. Jaya, Muhammad Yusuf, and Moti L. Rijal. 2024. "Evaluation of the Implementation of Ecotourism-Based Tourism Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities." *Riwayat Educational Journal of History and Humanities* 7(4):2589–2579. doi:10.24815/jr.v7i4.41367.

Izziyana, Wafda V., Nurwati Nurwati, Andika Y. Rimbawan, and Lailatul Fitri. 2022. "Aktualisasi Kebijakan Hukum Dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional." *Borobudur Law and Society Journal* 1(5):28–35. doi:10.31603/8650.

Kadung, Gerardus, Mohammad A. Lasaiba, and Daniel A. Sihasale. 2023. "Pengembangan Objek Wisata Pantai Weluan Di Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar." *Jpgu* 2(3):225–33. doi:10.30598/jpguvol2iss3pp225-233.

Kanaha, Ibnu. 2024. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara." *Micjo* 1(1):535–46. doi:10.62567/micjo.v1i1.65.

Karyadi, Lalu W., Muktasam Muktasam, Ika Wijayanti, and Luchman Hakim. 2024. "Implementation of Tourism Policies in the Development of Jerowaru Tourism Village, East Lombok." *Baileofisip* 2(1):107–19. doi:10.30598/baileofisipvol2iss1pp107-119.

Kaushal, Vikrant, and Sidharth Srivastava. 2021. "Hospitality and Tourism Industry Amid COVID-19 Pandemic: Perspectives on Challenges and Learnings From India." *International Journal of Hospitality Management* 92:102707. doi:10.1016/j.ijhm.2020.102707.

Khalid, Shahrukh, Muhammad S. Ahmad, T. Ramayah, Jinsoo Hwang, and Insin Kim. 2019. "Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Community Support for Tourism." *Sustainability* 11(22):6248. doi:10.3390/su11226248.

Khalim, Abdul, and Yuke Hernawati. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kampung Arab Panjunan Kota Cirebon." *Eco-Buss* 7(1):435–47. doi:10.32877/eb.v7i1.1477.

Kirana, Cintantya A. D., and Rike A. Artisa. 2020. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance Di Kota Batu." *Kolaborasi Jurnal Administrasi Publik* 6(1):68–84. doi:10.26618/kjap.v6i1.3119.

Lolkary, Selvi Y., and Samson Laurens. 2024. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Perspektif Collaborative Governance." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(12):14327–33. doi:10.54371/jiip.v7i12.6269.

Luntungan, Evelyn C. 2024. "Collaborative Governance in the Development of Likupang Super Priority Tourism Destination in North Sulawesi Province." *JTHS* 2(1):13–24. doi:10.32996/jths.2024.2.1.3.

M. Yusuf Sandy M. Yusuf Sandy. 2025. "Public-Private Collaboration in Sustainable Tourism Destination Management: Case Study of MaxOne Resort and Hotel Makassar." *Jimr* 3(1):341–56. doi:10.62504/jimr1202.

Mahyudin, Mahyudin. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Promosi Pariwisata Di Kabupaten Buton Utara." *Kybernan Jurnal Studi Kepemerintahan* 4(1):15–27. doi:10.35326/kybernan.v4i1.307.

Muallim, Ahmad H., Juharni Juharni, and Muh. R. Suaib. 2024. "Colaborative Governance Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *Adm* 2(2):83–88. doi:10.35965/pja.v2i2.5159.

Mubaroq, Husni, Nourma U. K. Devi, Evi W. Wahyuningsasi, and Moh. T. K. Ikhsan. 2023. "Perbaikan Fasilitas Dan Sosialisasi Sadar Wisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Bohay Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Abdi Panca Mara* 4(1):25–33. doi:10.51747/abdipancamarga.v4i1.1135.

Muhamad, Muhamad, Muhammad Baiquni, and Wiryanto Wiryanto. 2024. "Sustainable Tourism Observatories Framework at National Tourism Strategic Area Development (KSPN) in Indonesia." *International Research Journal of Business Studies* 17(3):251–66. doi:10.21632/irjbs.17.3.251-266.

Mutisari, Rini, Deny Meitasari, Heptari E. Dewi, Wiwit Widyawati, and Aniesa S. Bafadal. 2022. "Resiliensi Agrowisata Di Kota Batu Akibat Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 6(2):758. doi:10.21776/ub.jepa.2022.006.02.36.

Nugroho, Lucky D., Santi R. Melati, Ranitya Ganindha, Ida Wahyuliana, Landjar Kurniawan, Ditta Amilia, and Nur A. Bariroh. 2024. "Tourism SDGs Action Plan From a Regulatory Perspective." *Bio Web of Conferences* 146:01062. doi:10.1051/bioconf/202414601062.

Patarai, Muhammad I. 2021. "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1(11):1406–17. doi:10.59188/jurnalsostech.v1i11.237.

Pradana, Cerry S., Elisa D. Rohani, Alfian W. Yudhistira, and Sukma S. Safitri. 2024. "Kontribusi Virtual Tour Terhadap Pembentukan Citra Afektif Destinasi Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Pariwisata Terapan* 7(1):40. doi:10.22146/jpt.72353.

Pramadika, Taukhid, Mohammad S. Daffa, Panji A. Prabowo, and Fitri Rahmafitria. 2025. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pariwisata Halal: Studi Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Usaha." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 5(1):60–79. doi:10.30653/ijma.202551.121.

Ramadhan, Shofyan H., Ida B. Suryawan, and Made Sukana. 2022. "Pemasaran Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bali Bird Park, Kabupaten Gianyar." *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 13(1):1–7. doi:10.31294/khi.v13i1.11037.

Rasidi, Moh., and Alviana N. Sari. 2025. "Optimalisasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengembangan Wisata Pantai Greenthing Beach Desa Randutatah Kecamatan Paiton Probolinggo." *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4(2):5722–27. doi:10.31004/riggs.v4i2.1309.

Riadi, Slamet, Lisman Manurung, and Darmanto Darmanto. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao Di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau." *Publikauma Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 11(1). doi:10.31289/publika.v11i1.9535.

Rifka, Fakhrur R. 2025. "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Industri Perhotelan Di Indonesia: Sebelum, Saat, Dan Pasca Pandemi Covid-19." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5(2):1835–48. doi:10.53625/jirk.v5i2.10642.

Risfandini, Andini. 2024. "Sustainable Tourism Implementation in Indonesia: Emphasizing Green Tourism, Community-Based Tourism, and Local Empowerment." *Barista Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 11(01):58–67. doi:10.34013/barista.v11i01.1506.

Sabaruddin, Abdul, Robin Adnan, and Maulid Maulid. 2024. "Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka." *Jurnal Publik* 18(01):48–61. doi:10.52434/jp.v18i01.353.

Safitri, Dela, Tevila Akwila, Rizki N. Nugraha, and Vanny C. Nurmanto. 2023. "Resiliensi Destinasi Wisata Telaga Warna Puncak Setelah Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata* 6(2):747–55. doi:10.23887/jmpp.v6i2.66158.

Setiawan, Iwan. 2021. "Pengaruh Koordinasi Dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja Pengurus LPM Kelurahan Pasir Impun." *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2(4):253. doi:10.36418/syntax-imperatif.v2i4.99.

Setiawan, Setiawan. 2023. "Masyarakat Lokal Terhadap Bidang Pariwisata Berbasis Komunitas Di Dusun Gunung Tiga, Desa Cinta Ratu, Pangandaran." *Kabuyutan* 2(1):22–41. doi:10.61296/kabuyutan.v2i1.124.

Silomba, Arruan, Muhammad Masyyat, and M. S. Tajuddin. 2021. "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Mamasa." *Journal Peqguruang Conference Series* 3(2):674. doi:10.35329/jp.v3i2.1493.

Suryade, Lalu, Akhmad Fauzi, Noer A. Achsani, and Eva Anggraini. 2022. "Variabel-Variabel Kunci Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan Di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia." *Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas Dan Perjalanan* 6(1):16–30. doi:10.34013/jk.v6i1.327.

Trishananto, Yudha, Fuad Mas'ud, Setiawan, and Ulfah N. Fauziah. 2024. "Formulating Policies for Halal Tourism in Indonesia Based on Islamic Law." *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 24(1):47–70. doi:10.18326/ijtihad.v24i1.47-70.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1

Untu, Victoria N., Frederik G. Worang, and Rudy S. Wenas. 2022. "Pariwisata Dan Keuangan Digital: Kajian Literatur." *Jurnal Emba Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 10(2). doi:10.35794/emba.v10i2.41478.

Varanida, Dea. 2023. "Komunikasi Pariwisata Dalam Penerapan Kebijakan Publik Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Singkawang." *Responsive* 5(4):255. doi:10.24198/responsive.v5i4.44441.

Wardhana, Adhitya, Bayu Kharisma, Yasmin D. Setiadi, and Indah S. Diroatmodjo. 2025. "Analisis Pengaruh Akomodasi, Tenaga Kerja, Dan Belanja Pemerintah Terhadap Output Ekonomi Pariwisata Di Jawa Barat Periode 2017 – 2022 Dengan Pendekatan Generalized Least Squares (GLS)." *Jurnal Penelitian*

Inovatif 5(3):2101–12. doi:10.54082/jupin.1668.

Zainuri, Ahmad. 2022. "Creative Economic Empowerment Policy in Supporting Tourism Potential in Banten Province." *Indonesian Journal of Social Science Research* 3(1):29–38. doi:10.11594/ijssr.03.01.04.